



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024

RENJA TAHUN 2024

KECAMATAN BRANGSONG
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Cover	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Kata Pengantar	iv
BAB I Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Brangsong	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Daerah	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD	17
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	20
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	23
BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong	26
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	29
BAB V Penutup	30
Lampiran	
1. Rancanang Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun 2024	
2. SK Bupati Kendal Nomor 050/66/2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023	7
Tabel 2.2 : Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022	15
Tabel 2.3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi /Kabupaten /Kota	14
Tabel 2.4 : Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021	22
Tabel 2.5 : Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	23
Tabel 3.1 : Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023	25
Tabel 3.2 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	27

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena atas kasih dan karuniaNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

Keberadaan rencana kerja ini merupakan suatu langkah awal bagi kecamatan Brangsong dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan sasaran daerah yang ingin diwujudkan dan dijadikan sasaran jangka menengah Kecamatan Brangsong yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”***

Diharapkan rencana kerja ini dapat menjadi acuan dan pedoman dalam setiap pengambilan langkah maupun kebijakan Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Dengan demikian akan terciptakan keterpaduan dan kesinambungan dalam pelaksanaan program-program kerja guna tercapainya visi dan misi Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal. Di masa mendatang, sangat diharapkan pula masukan dan sasaran perbaikan dari berbagai pihak guna penyempurnaan penyusunan rencana kinerja periode selanjutnya.

Akhir kata, Rancanagan Akhir Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Brangsong Kabupaten Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik kami harapkan untuk penyempurnaan ke depannya.

Brangsong, Juli 2023

Camat Brangsong
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT
Pembina
NIP. 197306292005011003



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan nomenklatur urusan sampai dengan sub kegiatan yang sudah ditentukan.

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun ketiga dari pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Tahun 2024 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu satu Tahun Anggaran.

Rencana Kerja Tahun 2024 disusun sebagai bagian dari upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis guna mewujudkan visi misi Bupati Kendal yaitu *“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan”*, dan pada akhirnya ditujukan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kendal.

Renja PD Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 memuat evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023, serta memuat program dan kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran serta sumber dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024. Selanjutnya, karena berfungsi sebagai dokumen publik yang memuat daftar rencana program kegiatan Tahun 2023, maka proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini juga dilakukan secara top down dan bottom up, yaitu memadukan antara hasil kajian prioritas kebutuhan program dan kegiatan dengan kebijakan pemerintah atasan dan dokumen Renstra Kecamatan Brangsong serta RPJMD Kabupaten Kendal yang telah ditetapkan.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu Rencana Kerja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan, dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, Renja merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini, peraturan yang dipergunakan sebagai landasan hukum, adalah :

1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal 2024 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran untuk periode satu Tahun anggaran sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Brangsong 2021-2026 dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana program dan kegiatan prioritas Tahun 2024.

Adapun Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong ini bertujuan sebagai berikut:

1. Menyediakan satu acuan resmi bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dalam menentukan prioritas program dan kegiatan (Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja) Tahun 2024;
2. Menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2024;
3. Menyediakan satu acuan bagi Pemerintah Kecamatan Brangsong dalam penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) Tahun Anggaran 2024;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Brangsong dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2021-2026;
5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Pemerinah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Bab ini memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika penyusunan.
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong, serta Program dan Kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2022.
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Berisi mengenai Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2024
BAB V	PENUTUP Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Brangsong. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Brangsong menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Brangsong selama Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

. Realisasi pencapaian program dan kegiatan Renstra Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tabel T-C.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)
Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Targete Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Ralisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah									
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	30 dokumen	-	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	12 dokumen	40%
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	-	-	-	-	4 laporan	4 laporan	25%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 kegiatan	-	-	-	100%	1 kegiatan	1 kegiatan	33%

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 orang/bulan		15 orang/bulan	15 orang/bulan	100%	15 orang/bulan	30 orang/bulan	40%
	Penyediaan Administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						100%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	40%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	40%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 paket	-	12 paket	12 paket	100%	6 paket	18 paket	30%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	40%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	-	12 paket	12 paket	100%	12 paket	24 paket	40%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	60 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	9 dokumen	21 dokumen	35%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21 unit	4 unit	4 unit	4 unit	100%	5 unit	13 unit	62%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	14 unit	3 unit	8 unit	8 unit	100%	2 unit	13 unit	93%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	4 unit	7 unit	7 unit	100%	4 unit	15 unit	125%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	200%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	84 unit	-	16 unit	16 unit	100%	14 unit	30 unit	36%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 unit	- unit	14 unit	14 unit	100%	15 unit	29 unit	41%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	- unit	1 unit	1 unit	100%	2 unit	3 unit	60%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	90 unit	- unit	18 unit	18 unit	100%	18 unit	36 unit	40%
	PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								-	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan									
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 laporan	-	-	-	100%	1 laporan	1 laporan	100%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat									

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	6 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	50%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	60 lembaga	-	12 lembaga	12 lembaga	100%	12 lembaga	24 lembaga	40%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3 dokumen	-	0	0	100%	1 dokumen	1 dokumen	33%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	8 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100%	3 laporan	4 laporan	50%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									

	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah								-	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	24 laporan	40%
	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah									
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	50 orang	-	-	-	-	50 orang	50 orang	100%

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	250 orang	-	50 orang	50 orang	100%	50 orang	50 orang	40%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA									
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	60 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	12 dokumen	24 dokumen	40%
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	18 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	13 dokumen	72%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 dokumen	-	12 dokumen	12 dokumen	100%	1 dokumen	13 dokumen	72%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	-		0	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 dokumen	-	0	0	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	12 dokumen	-	0	0	100%	12 dokumen	12 dokumen	100%
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	2 dokumen	50%

Kecamatan Brangsong dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022, dan realisasi anggarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO.	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN		SISA ANGGARAN	PERSEN
			ALOKASI	REALISASI		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.650.000	4.650.000	0	100
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
		1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.892.325.000	1.673.313.508	219.011.492	88,42
		2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	75.280.000	75.280.000	0	100
		Administrasi Umum Perangkat Daerah				
		1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.020.000	5.020.000	0	100
		2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.129.000	28.129.000	0	100
		3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.786.000	18.786.000	0	100
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	22.860.000	21.775.000	1.085.000	95,52
		5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.535.000	11.459.000	76.000	99,34
		6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.244.000	2.244.000	0	100
		7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	57.440.000	57.423.000	17.000	99,97
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
		1. Pengadaan Mebel	15.000.000	14.985.000	15.000	99,90
		2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	65.480.000	63.106.900	2.733.100	96,37
		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	28.546.000	27.675.000	871.000	96,94
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				

		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.500.000	3.500.000	-	100
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	37.396.777	1.003.223	97,38
		3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.000.000	137.902.756	97.244	99,92
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18.910.000	17.608.660	1.301.340	93,11
		2.	Pemeliharaan Mebel	5.000.0000	5.000.000	0	100
		3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.300.000	6.300.000	0	100
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	49.560.000	440.000	99,12
		5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.656.000	25.052.000	604.000	97,64
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					
		1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	8.850.000	8.850.000	0	100
		2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	28.200.000	28.200.000	0	100
3.	Program Koordinasi Ketenraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					
		1.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	82.800.000	82.741.648	52.352	99,92
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	8.000.000	8.000.000	0	100
4.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					

		1.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	15.000.000	15.000.000	0	100
5.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
		1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	7.500.000	7.500.000	-	100
		2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	37.640.000	35.877.500	1.762.500	95,31
		3.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35.410.000	33.992.500	1.417.500	95,99
		4.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20.000.000	19.500.000	500.000	97,50
		5.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	8.850.000	8.850.000	0	100
	Jumlah Seluruhnya			2.776.561.000	2.545.574.249	230.986.751	
	Prosentase						91,68

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Brangsong Tahun 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp. 2.776.561.000,- (Dua milyar Tujuh ratus tyjuh puluh enam juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah), terserap anggaran sebesar Rp. 2.545.574.249,- (Satu milyar lima ratus empat puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 230.986.751,- (Dua ratus tiga puluh juta Sembilan ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah) merupakan penghematan. Keseluruhan anggaran yang terserap telah dipergunakan untuk mendanai keseluruhan program kegiatan Kecamatan Brangsong Tahun 2022 dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

- Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Camat juga melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang meliputi aspek :

- a. perizinan;
- b. rekomendasi;
- c. koordinasi;
- d. pembinaan;
- e. fasilitasi;
- f. penetapan;
- g. penyelenggaraan; dan
- h. kewenangan lain yang dilimpahkan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Kendal No. 77 Tahun 2016 Pasal 3 bahwa Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum;
- b. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- e. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- h. pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan sebagaimana tersebut diatas, Camat selaku Pimpinan Kecamatan juga melaksanakan pendelegasian kewenangan yang diberikan Bupati sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Otonomi Daerah. Sebagian kewenangan yang dilimpahkan tersebut meliputi 20 bidang yaitu : pengembangan otonomi daerah; perimbangan keuangan daerah; perekonomian; pertamanan, keindahan

dan kebersihan lingkungan; permukiman; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan; sosial dan kesejahteraan rakyat; pertanian; pertanian tanaman pangan; perkebunan dan kehutanan; peternakan; perikanan dan kelautan; pertambangan umum; pekerjaan umum; pengairan; penataan ruang; perindustrian dan perdagangan; lingkungan hidup serta bidang pemuda dan olah raga.

Kecamatan Brangsong sesuai dengan Perbub nomor 8 Tahun 2016 mempunyai tugas dan fungsi pelayanan masyarakat, namun pelayanan yang dilaksanakan di Kecamatan Brangsong sebatas pada pemberian legalisasi Camat yang kemudian ditangani oleh Instansi lain, pelayanan yang berkaitan dengan Adminitrasi Kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, SKCK oleh Polsek dan Polres, sebagian perijinan yang berskala kecil yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dengan luasan bangunan kurang dari 100 m², sedangkan perijinan yang berskala besar dilaksanakan oleh DPMPT-SP dan sebagainya, artinya baik buruknya pelayanan masyarakat pada proses pelayanan tersebut secara langsung yang mendapat aduan atau ketidak puasan atas pelayanan publik adalah Kecamatan, untuk itu perlu bersinergi dengan instansi terkait, dan melakukan kiat - kiat serta strategi dalam peningkatan pelayanan, misalnya kecepatan dan ketepatan dalam pelayanan, upaya jemput bola dengan sosialisasi ke desa-desa, pemeliharaan perangkat komputer agar selalu siap untuk melaksanakan kegiatan pelayanan.

Tabel 2.3 Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	-	70	71	72	-	70.37	71	72	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	-	-	79	80	-	79.62	79	80	

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (PD) dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program-program Pemerintah . Kecamatan Brangsong adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya ruang laktasi, sarana untuk disabilitas dan posko pengaduan, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Brangsong terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas.

Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program Nasional, seperti SPM dan isu strategis saat ini antara lain:

- Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
- Pembangunan Infrastruktur
- Pelayanan Publik dan Perijinan
- Tata Kelola Pemerintahan Yang Kondusif dan Demokratis

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program nasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu mengawasi perkembangannya

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD.

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Brangsong adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan
 - Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan Perangkat Daerah
 - Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Bekerja sama dengan tenaga ahli dalam mengelola sumberdaya yang ada
 - Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Review RKPD (Renja) yang dilakukan adalah perbandingan antara perencanaan dalam Renja dengan realisasi akhir tahun sesuai dengan analisis kebutuhan serta dibandingkan dengan Renstra yang ada, namun demikian ada beberapa kegiatan yang memang tidak secara terus menerus dilaksanakan karena disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada.

Demikian juga untuk kegiatan lain seperti :

Pembinaan, penyuluhan dan koordinasi bidang kelembagaan/ administrasi, lingkungan hidup, dan Linmas, serta bidang kepemudaan tidak setiap tahun dilaksanakan karena menyesuaikan dengan besaran anggaran yang tersedia.

Tabel 2.4 Tabel. T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Brangsong

No	Rancangan Awal RKPD (materi RKPD Tahun 2022)					Hasil Analisis Kebutuhan (materi RKPD Tahun 2022)					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	3.129.614	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Kecamatan Brangsong	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	100%	2.513.061	
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamata	100%	9.250	Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan Brangsong	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamata	100%	11.250	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	78.000	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.	Kecamatan Brangsong	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	100%	37.050	
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	83.664	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Brangsong	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	90.800	
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	100%	9.000	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Kecamatan Brangsong	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	100%	15.000	
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	37.100	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	Kecamatan Brangsong	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100%	109.400	
					3.346.628					2.776.561	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program/kegiatan dari masyarakat pada umumnya tercantum dalam kegiatan Musrenbangcam, yaitu kegiatan untuk kepentingan umum, serta sarana prasarana pelayanan lainnya. Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di SKPD teknis yang ada di Kabupaten Kendal. Namun demikian kegiatan – kegiatan yang memerlukan anggaran yang cukup besar sangat bergantung pada kemampuan APBD Kabupaten Kendal.

Tabel 2.5 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Brangsong

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	N I H I L				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

- **Arah Kebijakan Nasional**

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur melalui Percepatan Pembangunan di Berbagai Bidang dengan Menekankan Terbangunnya Struktur Perekonomian yang Kokoh Berlandaskan Keunggulan Kompetitif di Berbagai Wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing". Tujuh agenda pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 tetap dipertahankan dalam RKP Tahun 2023 menjadi tujuh Prioritas Nasional (PN), yakni (1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; (2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; (4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; (5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; (6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta (7) Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

- **Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024**

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2024 ditujukan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas", dengan prioritas daerah diarahkan pada: (a) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sector unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas; (b) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar dan adaptif secara inklusif dan merata; (c) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; (d) Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

- **Arah Kebijakan Kabupaten Kendal Tahun 2024**

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024 di prioritaskan pada "Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep smart city". Arah kebijakan fokus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan

penganggaran, peningkatan clean and good governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smat Health, Smart Economy dan Smart Transportation.

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab Kendal	Program/ Kegiatan dalam Renja 2024
Peningkatan Produktivitas untuk transformasi Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Perwujudan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep smart city	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Brangsong

Sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, maka tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2023 pada prinsipnya merupakan bagian dari tujuan dan sasaran Rencana Strategis Kecamatan Brangsong tahun 2021-2026. Adapun tujuan dan sasaran Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Memaksimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif
Dengan Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan;
- 2) Meningkatkan kualitas mental dan kepribadian masyarakat yang beriman dan bertakwa.
Dengan sasaran: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas;
- 3) Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelompok-kelompok usaha ekonomi masyarakat.
Dengan sasaran: Meningkatnya partisipasi perempuan dan pemuda dalam pembangunan melalui pemberdayaan Karang Taruna dan PKK;
- 4) Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, rasa ketentraman dalam masyarakat, dan solidaritas dan toleransi inter dan antar umat beragama.
Dengan sasaran: Terwujudnya kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah yang mantap serta kondusif;
- 5) Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pelayanan prima dan kinerja pemerintah kecamatan yang responsif, profesional dan akuntabel.
dengan sasaran sebagai berikut :
 - a. Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat;
 - b. Terpenuhinya sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kecamatan;
 - c. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Meningkatnya kemampuan, disiplin serta kesejahteraan aparatur pemerintahan kecamatan dan desa

3.3 Program dan Kegiatan

Rancangan awal RKPD menjadi acuan tahunan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja PD, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra PD menjadi pedoman jangka menengah lima tahunan dalam menjabarkan tujuan dan sasaran dalam program/kegiatan yang selaras dengan rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru demi tercapainya sasaran pada Renstra PD. Usulan program serta kegiatan yang bersumber dari aspirasi masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam penyempurnaan rancangan akhir Renja PD dengan mengakomodir aspirasi yang sesuai

dengan tugas dan fungsi serta program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Penyusunan Rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kecamatan Brangsong Tahun 2024 ini juga dalam rangka sinkronisasi terhadap Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Penyelarasan yang dilakukan melalui proses pemetaan dengan menyandingkan program/kegiatan/sub kegiatan yang ada. Masa peralihan ini masih mempedomani RPJMD serta Renstra yang dijabarkan pada Renja PD Tahun 2024 dan merupakan tahun ke-4 atau tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 .

Tabel 3.1 (Tabel T-C.33.)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024
dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama PD : Kecamatan Brangsong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7 01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Brangsong	100 %	2.395.452.548	PAD & DAU			2.983.096.500
7 01 02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	Kecamatan Brangsong	100 %	19.973.000	PAD			22.000.000
7 01 03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Prosentase aspirasi masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	Kecamatan Brangsong	100 %	61.843.000	PAD			68.600.000

	7	01	04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	Kecamatan Brangsong	100 %	104.976.000	PAD			110.404.000
	7	01	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Prosentase kasus konflik sosial yang ditangani	Kecamatan Brangsong	100 %	32.350.000	PAD			33.850.000
	7	01	06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Prosentase penyusunan APBDes tepat waktu	Kecamatan Brangsong	100%	36.160.000	PAD			47.000.000
								2.650.754.548				3.264.950.500

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan yang berisikan rencana pembangunan tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi Kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah. Prioritas Program dalam Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Tahun 2024 terdiri dari 6 program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Rencana Kerja ini berisi program dan kegiatan prioritas guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui dan mengakomodir prakiraan maju program dan kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2023. Prioritas program dan kegiatan yang tertuang di dalam Rencana Kerja ini bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun yang dijabarkan dalam rencana kerja perangkat daerah disesuaikan dengan prioritas daerah setiap tahun sehingga kebutuhan pendanaan dapat diselaraskan.

Adapun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Tahun 2024 mulai dari program dan kegiatan serta pendanaan dapat dilihat di lampiran I

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabuapten Kendal Tahun 2021–2026 serta memeperhatikan Rencana Strategis Kecamatan Brangsong Tahun 2021–2026.

Penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Rencana Kerja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan feedback terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan Kecamatan Brangsong.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk turut serta mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, khususnya masyarakat diwilayah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

Semoga Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sumber untuk pihak-pihak lainnya khususnya bagi pihak Kecamatan Brangsong.

Camat Brangsong
Kabupaten Kendal



Naskah Dinas ini ditandatangani
secara elektronik

YUNAN ARIEF RAKHMAN, ST, MT
Pembina
NIP. 197306292005011003



**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN BRANGSONG KAB. KENDAL
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN BRANGSONG						2.650.754.548,00						3.264.950.500,00		
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.650.754.548,00							3.264.950.500,00	
	7.01	KECAMATAN						2.650.754.548,00							3.264.950.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100.00 %			100.00 %	2.395.452.548,00						100.00 %	2.983.096.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	-			11 Dokumen	6.360.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	12.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	3.180.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		6.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	88.680.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		88.680.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase capaian administrasi kepegawaian PD	-			100 %	10.500.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	10.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	10.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		10.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor	-			100 %	175.036.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	159.765.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.289.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		5.775.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	30.184.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		30.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	15.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		17.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.091.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		8.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		2.640.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	90.072.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		69.850.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan yang diadakan	-			9 Unit	75.200.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	125.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				27 Unit	20.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		45.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				3 Unit	31.000.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		50.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	24.200.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		30.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan tersedianya jasa kantor	-			12 Bulan	192.885.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	196.840.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		5.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	49.985.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		53.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	138.900.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		138.840.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah aset yang dipelihara	-			46 Unit	42.600.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	328.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	19.600.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		30.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				18 Unit	11.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		13.500.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		250.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				18 Unit	12.000.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		35.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	90 %			90 %	19.973.000,00						90 %	22.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	-			1 Kegiatan	19.973.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	22.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha														
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				12 Dokumen	19.973.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		22.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	60 %			60 %	61.843.000,00						60 %	68.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	<i>Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa</i>	-			12 Desa	61.843.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	68.600.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				12 Lembaga Kemasyarakatan	15.600.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdayasaing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pen gendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		21.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	13.513.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		15.600.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	32.730.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		32.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	87 %			87 %	104.976.000,00						87 %	110.404.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah koordinasi penyelenggaraan trantibum	-			12 Desa	21.672.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				1 Laporan	21.672.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<i>Jumlah koordinasi penerapan dan penegakan perda</i>	-			12 Dokumen	83.304.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN	-	85.404.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				12 Laporan	83.304.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	ASN		85.404.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	<i>Persentase kasus konflik sosial yang di tangani</i>	85 %			85 %	32.350.000,00						85 %	33.850.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan	-			3 Kegiatan	32.350.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa	-	33.850.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				55 Orang	29.700.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		25.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	2.650.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		8.850.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyusunan APBDes tepat waktu	100 %			100 %	36.160.000,00						100 %	47.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pembinaan pengawasan Pemerintah Desa	-			12 Desa	36.160.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa	-	47.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				2 Dokumen	9.540.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		10.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	20.260.000,00	Kab. Kendal, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		15.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				2 Dokumen	6.360.000,00	Kab. Kendal, Brangsong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani	Pemerintah Desa		22.000.000,00	KECAMATAN BRANGSONG
	JUMLAH							2.650.754.548,00							3.264.950.500,00	



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 66 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat

Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :

a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :

a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan

b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024.

8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua, Sekretaris, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KENDAL



DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/66/2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Brangsong	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Brangsong	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Brangsong	Anggota	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Agni Nurmala Vita, A.Md; 2. Hary Santoso; 3. Muchyidin; dan 4. Mulyadi
4.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Nur Patoni; dan 2. Siti Nur Azizah.
5.	Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban		
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	- Bayu Pamungkas

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	1. Kanafi; dan 2. Dwi Rivaldi
7.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Brangsong	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Brangsong	Anggota	- M. Abdul Rahman Wahid.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO